

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA SMA NEGERI 11 SERAM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

Moch. Kuspriyanto
mochkuspriyanto@gmail.com
SMA Negeri 11 Seram

ABSTRACT

The aim of this research was designed to describe the implementation of the Indonesia Pintar program at SMA Negeri 11 Seram Timur, analyzing the supporting factors for the Indonesia Pintar Program at SMA Negeri 11 Seram Timur Regency, East Seram, Maluku Province. This study used descriptive qualitative method. The results of the research regarding Determination of KIP Acceptance, Distribution of PIP, Notification and Submission of Decision Letters, Account Activation and Withdrawal of Funds and Cancellation of KIP were carried out smoothly by SMA Negeri 11 Seram Timur, even though the geographical location of the school made the process of collecting PIP funding assistance late.

Keywords: evaluation, smart Indonesia program

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dirancang untuk mendiskripsikan pelaksanaan implementasi program Indonesia Pintar di SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur, menganalisis Faktor pendukung Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai Penetapan Penerimaan KIP, Penyaluran PIP, Pemberitahuan dan Penyampaian Surat Keputusan, Aktivasi Rekening dan Penarikan Dana dan Pembatalan KIP dilaksanakan dengan lancar oleh SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur walaupun letak geografis sekolah membuat terlambatnya proses pengambilan bantuan dana PIP.

Kata kunci: evaluasi, program Indonesia pintar

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

TINJAUAN TEORETIS Kebijakan Publik

Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai "Hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya". Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik.

Menurut W.N. Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas,

dan sebuah pembangunan perkotaan.

Menurut G. Peters mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Carl Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.

Kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntunan semua anggota masyarakat.

Menurut Amara Raksasataya mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebuah kebijakan yang sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Arnold Rose mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah Selanjutnya kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan sebuah rangkaian suatu tindakan yang saling berubungan.

Menurut Bill Jenkins mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang berdasarkan pada hubungan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah aktor politik agar untuk menentukan sebuah tujuan dan mendapatkan sebuah hasil yang berdasarkan suatu pertimbangan situasi

tertentu.

Dari berbagai definisi menurut beberapa teori kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan aktor utama dalam melaksanakan kebijakan publik yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh masyarakat demi kepentingan masyarakat (publik).

Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. (www.gurupendidikan.co.id)

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Premendikub RI no.8, 2017). Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbandingan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Evaluasi Implementasi

Anderson (dalam Arikunto, 2004)

memandang Evaluasi sebagai sebuah proses penentuan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Anderson juga menyampaikan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan atau ketidakcocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi.

Cochran (2012:11) mengungkapkan tentang evaluasi yaitu *Policy evaluation thus involves collecting and analyzing information about the efficiency and effectiveness of policies* (Evaluasi kebijakan merupakan proses pelibatan, pengumpulan dan penganalisaan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kebijakan). Sehingga oleh Cochran memberikan dimensi dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu: 1) Efisiensi kebijakan, untuk melihat biaya aktif untuk tujuan utama, 2) Efektifitas kebijakan, untuk melihat sejauh mana tujuan mendasar dan kebutuhan sasaran/warga

terpenuhi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas maupun outcome kebijakan.

Dari uraian diatas, dapatlah dijelaskan bahwa yang menjadi fokus analisis dampak penggunaan dana PIP pada SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. Adapun dimensi yang dikaji adalah selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan. Artinya mengkaji kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan (*expected service*) dengan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan (*percieved sevice*), dimana hal tersebut merupakan tolok ukur dari tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan atau kinerja penyelenggara pelayanan.

Program Indonesia Pintar

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya personal pendidikan dimaksud meliputi:

1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan

adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu : suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainya dalam masyarakat.

Fokus penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moelong (2017:93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Adapun fokus masalah mengenai Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku diantaranya adalah: Mekanisme Implementasi Program Indonesia Pintar pada SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur berdiri pada tahun 2011 dengan nama SMA LKMD Amarsekaru bertempat di desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur pada waktu itu pertama kali yang menjadi kepala sekolah adalah kepala sekolah yang definitifnya di SMP Negeri 4 Pulau Gorom, dan oleh masyarakat ditunjuk untuk merangkap memimpin di SMA LKMD Amarsekaru namanya adalah Dait Rumodar.

Seiring berjalannya waktu karena suatu hal bapak Dait Rumodar dipindahtugaskan di sekolah lain, diangkatlah kepala sekolah selanjutnya Nurdin Kilubas yang memimpin SMA LKMD dari tahun 2012 s.d 2016 karena meninggal dunia akhirnya kepemimpinan yang ke tiga yaitu Moch. Kuspriyanto dan pada tahun 2016 itu juga sekolah sudah menjadi negeri dengan nama SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur masih dipegang oleh kabupaten, SMA mulai 2017 sampai dengan sekarang sudah dipegang oleh pemerintah provinsi Maluku.

Pembahasan

Penetapan Penerimaan KIP yang berasal dari keluarga miskin di dapat dari pengambilan data peserta didik mulai dari pengisian formulir pendaftaran, pengisian data pada waktu pendaftaran ulang dengan melampirkan berbagai berkas yang diperlukan kemudian dilakukan verifikasi data dan validasi data ke dapodik. dengan demikian proses penetapan data pengusulan calon penerima bantuan dana PIP yang dilakukan oleh SMA Negeri 4 Seram Bagian Timur sudah sesuai dengan mekanisme dan tujuan Program Indonesia Pintar Permendikbud No.9 Tahun 2018.

1. Penyaluran Dana PIP

Penyaluran Dana PIP kepeserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan simpanan pelajar di bank penyalur berjalan dengan lancar sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah, dan sesuai juknis Program Indonesia Pintar Permendikbud No.9 Tahun 2018.

2. Pemberitahuan Dan Penyampaian Surat Keputusan

Pemberitahuan dan penyampaian surat keputusan dari direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah kepada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maluku lalu di tindak lanjuti

oleh SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur dengan melaksanakan rapat kepada wali peserta didik berjalan sesuai prosedur yang sudah ditentukan, sesuai juknis Program Indonesia Pintar Permendikbud No.9 Tahun 2018.

3. Aktivasi Rekening PIP Dan Penarikan Dana

Aktivasi rekening PIP dan penarikan dana dilakukan secara kolektif oleh sma negeri 11 seram bagian timur karena letak geografis sekolah yang jauh dari kabupaten seram bagian timur dan kurang lancarnya transportasi laut, akan tetapi walau agak terlambat proses aktivasi rekening PIP dan penarikan dana bantuan PIP di kategorikan sudah sesuai dengan mekanisme Program Indonesia Pintar dan sesuai juknis Program Indonesia Pintar Permendikbud No.9 Tahun 2018.

4. Pembatalan KIP

Pembatalan KIP yang putus sekolah dan meninggal dunia yang diusulkan oleh kepala sekolah kepada dinas pendidikan dan kebudayaan dinas provinsi maluku kemudian dilaporkan secara tertulis kepada direktorat terkait sesuai prosedur yang telah di tentukan Program Indonesia Pintar Permendikbud No.9 Tahun 2018.

Faktor Pendukung Pendukung

Faktor pendukung Program Indonesia Pintar Di SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur di lakukan oleh komponen sekolah yang di dalamnya termasuk pendidik, wali peserta didik karena adanya Program Indonesia Pintar sangat membantu kelancaran pendidikan di SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur untuk mewujudkan sekolah gratis yang berkualitas.

SIMPULAN

Mekanisme implementasi Program Indonesia Pintar :

Penetapan Penerimaan KIP yang berasal dari keluarga miskin di dapat dari

pengambilan data peserta didik mulai dari pengisian formulir pendaftaran, pengisian data pada waktu pendaftaran ulang dengan melampirkan berbagai berkas yang diperlukan kemudian dilakukan verifikasi data dan validasi data ke dapodik. dengan demikian proses penetapan data pengusulan calon penerima bantuan dana PIP yang dilakukan oleh SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur sudah efektif dan efisien.

Penyaluran Dana PIP kepeserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan simpanan pelajar di bank penyalur berjalan dengan lancar sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah.

Pemberitahuan dan penyampaian surat keputusan dari direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah kepada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maluku lalu di tindak lanjuti oleh SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur dengan melaksanakan rapat kepada wali peserta didik berjalan sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

Aktivasi rekening PIP dan penarikan dana dilakukan secara kolektif oleh SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur karena letak geografis sekolah yang jauh dari kabupaten seram bagian timur dan kurang lancarnya transportasi laut, akan tetapi walau agak terlambat proses aktivasi rekening PIP dan penarikan dana bantuan PIP di kategorikan masih lancar.

Pembatalan KIP yang putus sekolah dan meninggal dunia yang diusulkan oleh kepala sekolah kepada dinas pendidikan dan kebudayaan dinas provinsi maluku kemudian dilaporkan secara tertulis kepada direktorat terkait sesuai prosedur yang telah di tentukan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur di lakukan oleh komponen sekolah yang di dalamnya termasuk pendidik, wali peserta didik karena adanya program indonesia pintar sangat membantu

kelancaran pendidikan di sam negeri 11 seram bagian timur untuk mewujudkan sekolah gratis yang berkualitas

DAFTAR PUSTAKA

- Karmila, Zulfan, Firdaus Mirza Nusuary. 2019. *Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, diakses pada 5 November 2019, 7.52 am WIB.
- Moelong, L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riska srihandayani djoyosuroto. 2019. *Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri Dumoga*, diakses pada 18 November 2019, 8.00 am WIB.
- Rusli, B. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera.
- Sutardji. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Buku Ajar.
- Sutardji. 2015. *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Buku Ajar.
- Wirastiani binti Yusup, Bambang Ismanto, Wasitohadi. 2019. *Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Peningkatkan Akses Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Salatiga*. diakses pada 18 November 2019.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia www.jdih.kemdikbud.go.id diakses pada 5 November 2019,9.23 AM. WIB.
- Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli Terlengkap <<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>>diakses pada tanggal 23

November 2019, 02.27 WIB.